



REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
TAHUN 2017





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### 3.3.2 REFORMA AGRARIA

#### Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Tabel 3.72  
Sasaran Umum  
Prioritas  
Nasional  
Reforma  
Agraria Tahun  
2017

No	Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
<b>A. Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)</b>						
1.	Bidang dan Kawasan yang di inventarisasi	162.270 ha	142.400 ha	2.464.400 ha	2.464.400 ha	10 Juta ha
2.	Luas identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan	-	-	-	-	4,1 Juta ha
3.	Data penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar	231.500 ha	253.495 ha	253.495 ha	253.495 ha	1 Juta ha
4.	Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah)	868.130 Bidang	0 Ha	975.000 ha	975.000 ha	3,9 Juta ha
<b>B. Pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset (reforma aset)</b>						
1.	Bidang tanah yang didistribusi	158.529 Bidang	107.150 Bidang	1.098.213 Bidang	1.098.213 Bidang	4,5 Juta ha
2.	Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah)	868.130 Bidang	0 Ha	1.125.000 ha	1.125.000 ha	4,5 Juta ha
<b>C. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah</b>						
1.	Tercakupnya peta agraria (tercakupnya peta dasar/ tercakupnya peta tematik/ tercakupnya peta nilai tanah/ KDKN/JRSP)		2.800.000 ha	2.650.000 ha	2.650.000 ha	13,4 Juta ha
2.	Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah)	868.130 Bidang	1.550.806 ha	1.550.806 ha	1.550.806 ha	7 Juta ha
3.	Tercakupnya peta dasar teknik	-	37.811,32 km	37.811,32 km	37.811,32 km	189.056,6 Km
4.	Jumlah sistem informasi hukum di bidang agraria dan tata ruang	-	17 provinsi	17 provinsi	17 provinsi	34 Provinsi
<b>D. Meningkatnya Pelayanan Pertanahan</b>						
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan/ program/ anggaran/ data/ informasi/ kebijakan bidang tata kelola kepegawaian Kementerian ATR/BPN	-	Penyusunan analisa jabatan	Penerimaan 2.717 juru ukur	Penerimaan juru ukur	30% dari jumlah total pegawai Kementerian ATR/BPN
2.	Sistem teknologi operasional pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan	430 kantor pertanahan	539 kantor pertanahan	539 kantor pertanahan	539 kantor pertanahan	539 Kantor Pertanahan
<b>E. Meningkatnya Kepastian Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</b>						
1.	Jumlah peraturan di bidang agraria dan tata ruang	-	1 Perpres	1 Perpres	1 Permen, terbentuknya lembaga penyediaan tanah	Tersusunnya peraturan perundangan pembentukan lembaga penyediaan tanah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Indikator	2014 <i>Baseline</i>	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
	2. Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program pengadaan tanah	-	-	-	Operasio- nal lembaga penyediaan tanah	Pembelian tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh Lembaga Penyediaan Tanah di Lokasi Prioritas

### Arah Kebijakan

1. Reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat
2. Membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
3. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan
4. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

### Kebijakan terkait Revolusi Mental

1. Pelayanan Pertanahan yang cepat, murah, dan memuaskan
2. Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. Kementerian ATR/BPN menjadi *'leading sector'* pelaksanaan Reforma Agraria

Gambar 3.103  
Arah Kebijakan  
Prioritas  
Nasional  
Reforma Agraria  
Tahun 2017

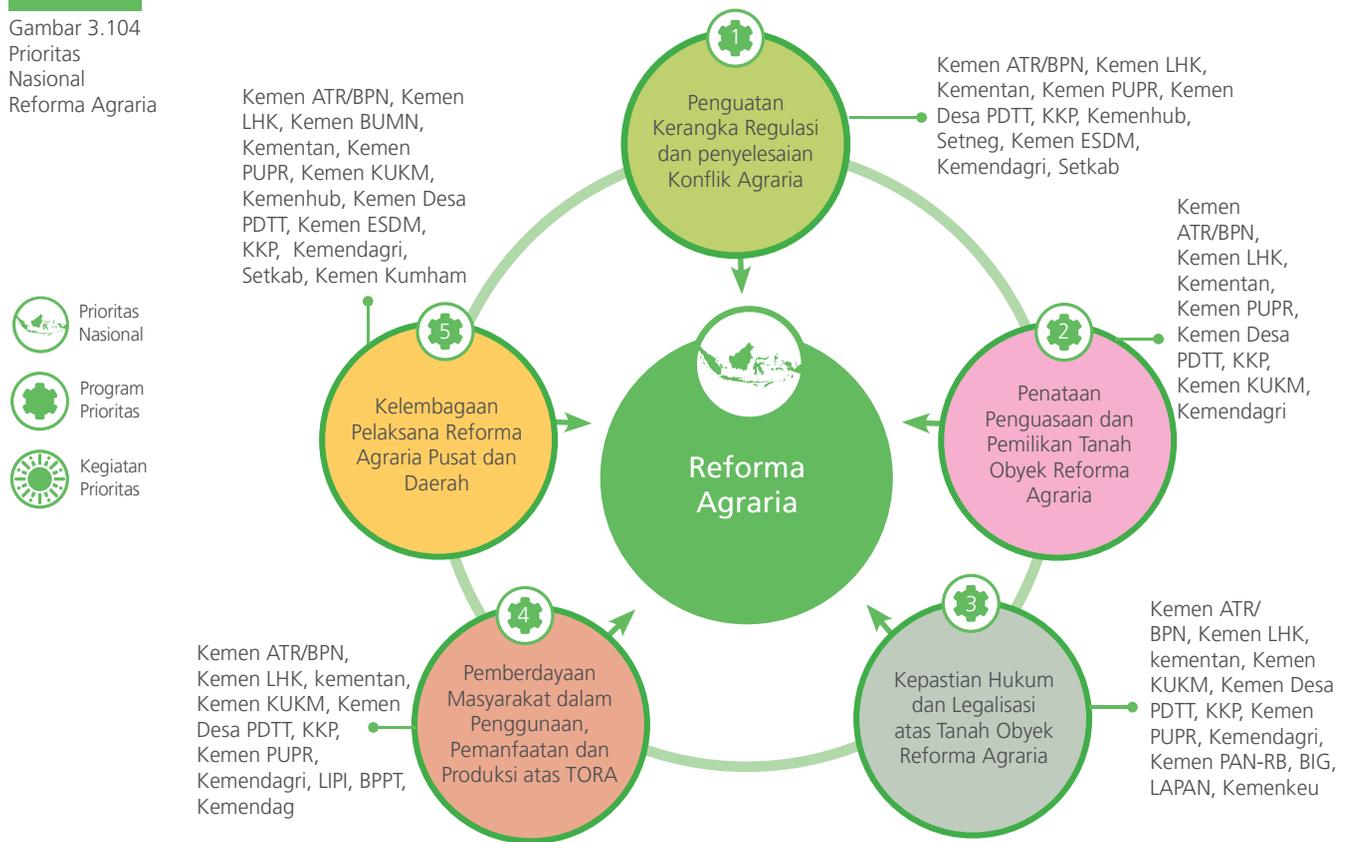
### Program Prioritas Nasional

Prioritas Nasional Reforma Agraria mencakup lima Program Prioritas, yang disajikan pada Gambar 3.104. Dari setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas seperti dalam Gambar 3.105 sampai 3.109.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

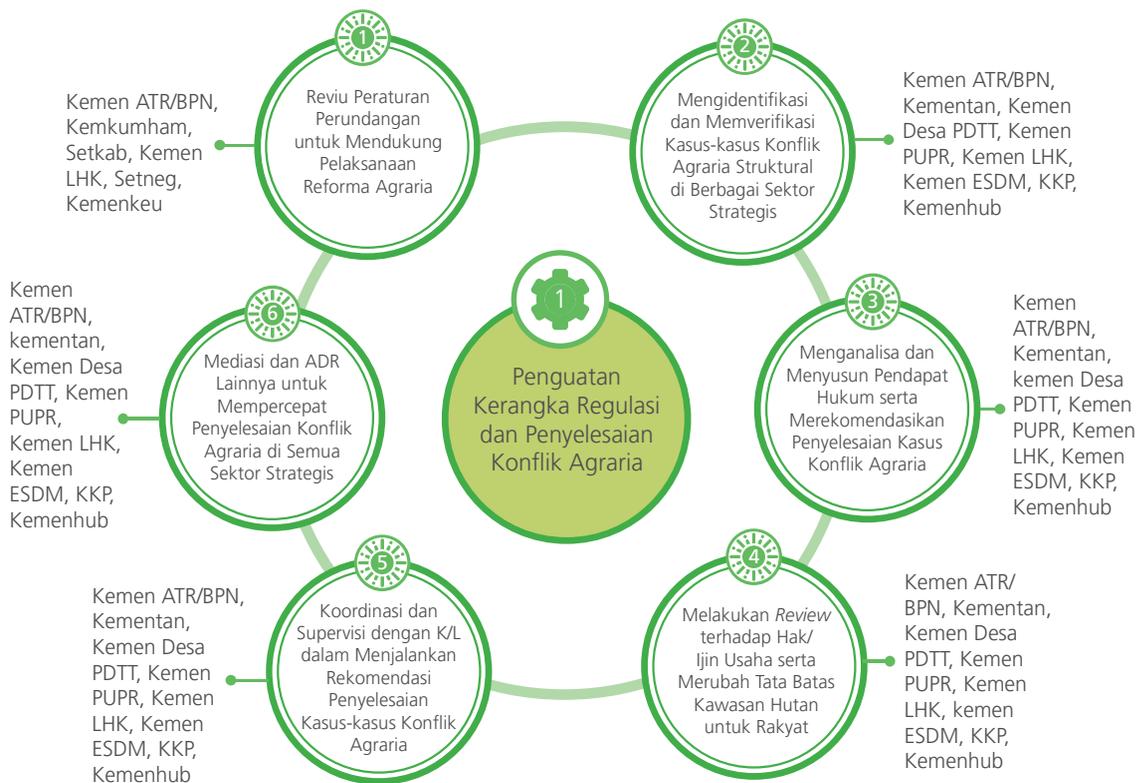
Gambar 3.104  
Prioritas  
Nasional  
Reforma Agraria



### 11.3.1. Program Prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

Program prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, dilakukan untuk mendukung pelayanan pertanahan dan upaya penyelesaian konflik tanah yang bersifat struktural untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui: (i) Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria; (ii) Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis; (iii) Menganalisa dan Menyusun Pendapat Hukum serta Merekomendasikan Penyelesaian Kasus Konflik Agraria; (iv) Penyusunan *Review* terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat; (v) Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria; dan (vi) Mediasi dan ADR Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis.

### Kegiatan Prioritas



Gambar 3.105 Kegiatan Prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	
	1. Reviu peraturan perundangan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria	2 Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 Permen ATR/BPN
	2. Mengidentifikasi dan memverifikasi kasus-kasus konflik agraria struktural di berbagai sektor strategis	300 kasus
	3. Menganalisa dan menyusun pendapat hukum serta merekomendasikan penyelesaian kasus konflik agraria	40 kasus
	4. Melakukan review terhadap hak/ijin usaha serta merubah tata batas kawasan hutan untuk rakyat	1 SK
	5. Koordinasi dan supervisi dengan K/L dalam menjalankan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus konflik agraria	1.216 kasus
	6. Mediasi dan ADR lainnya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di semua sektor strategis	344 kasus

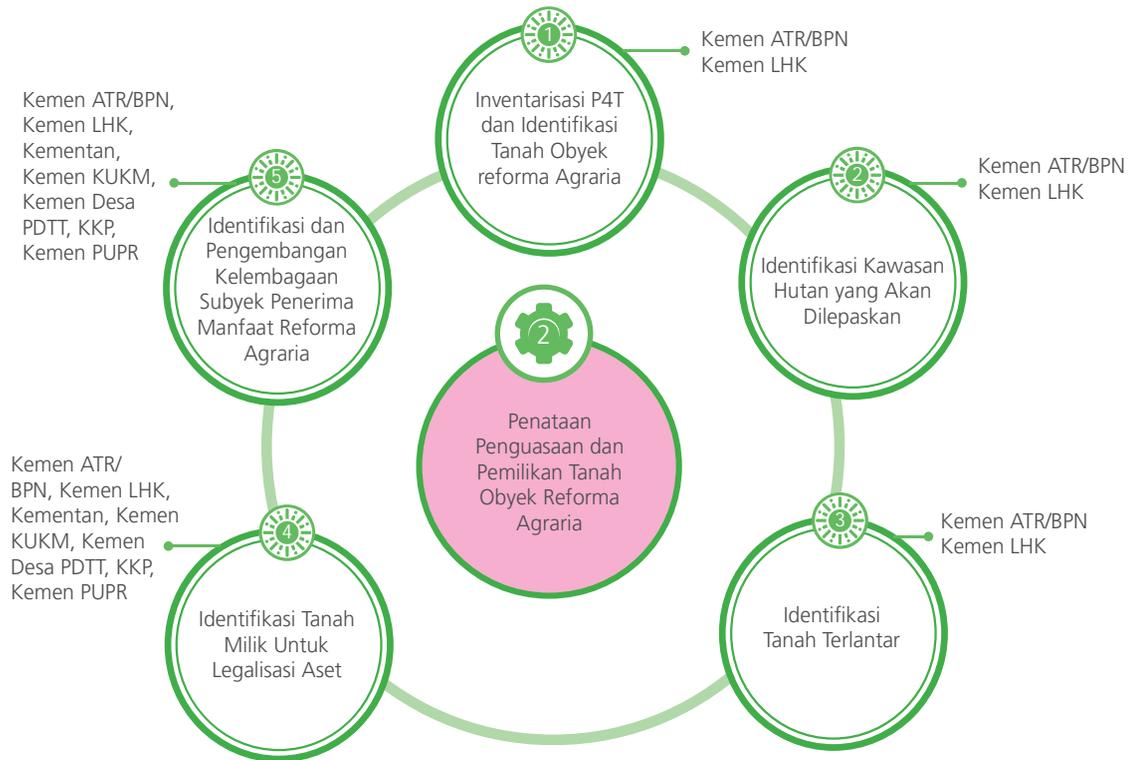
Tabel 3.73 Kegiatan Prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

### 11.3.2. Program Prioritas Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

Program Prioritas Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi tanah sebagai sumber obyek pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset dalam kerangka reforma agraria melalui: (i) Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) dan Identifikasi tanah obyek Reforma Agraria; (ii) Identifikasi Kawasan Hutan yang akan Dilepaskan; (iii) Identifikasi dan Redistribusi HGU habis dan tanah terlantar; (iv) Identifikasi tanah milik untuk legalisasi aset masyarakat miskin; dan (v) Identifikasi dan pengembangan kelembagaan subyek penerima manfaat Reforma Agraria.

### Kegiatan Prioritas

Gambar 3.106  
Kegiatan  
Prioritas  
Penataan  
Penguasaan  
dan Pemilikan  
Tanah Obyek  
Reforma  
Agraria



Tabel 3.74  
Kegiatan  
Prioritas  
Penataan  
Penguasaan  
dan Pemilikan  
Tanah Obyek  
Reforma  
Agraria

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	
	1. Inventarisasi P4T dan Identifikasi tanah obyek reforma agraria	365.050 bidang
	2. Identifikasi Kawasan Hutan yang akan Dilepaskan	108.637 bidang
	3. Identifikasi Tanah Terlantar	481 SP
	4. Identifikasi Tanah Milik untuk Legalisasi Aset	879.250 bidang
	5. Identifikasi dan pengembangan kelembagaan subyek penerima manfaat reforma agraria	444 satker

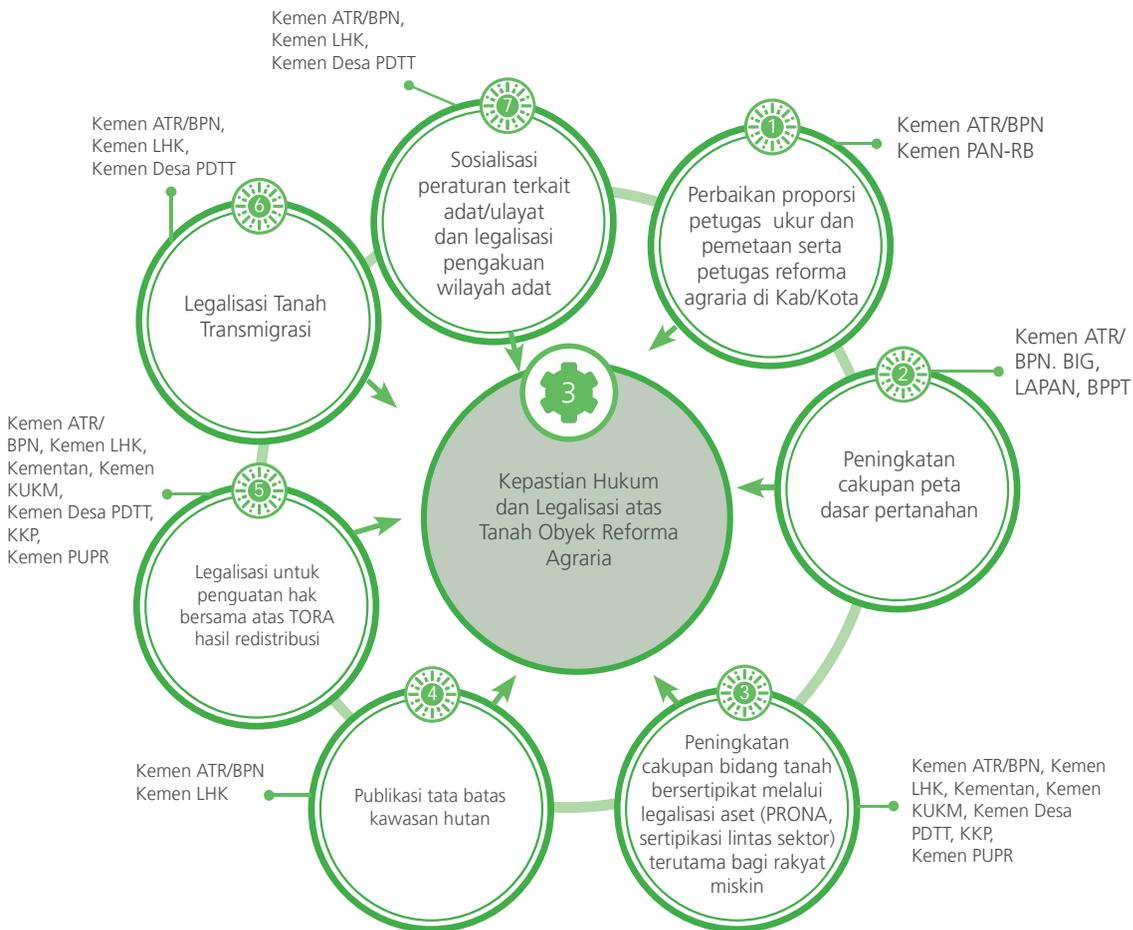
#### 11.3.3. Program Prioritas Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria

Program Prioritas Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria, dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dalam kerangka reforma aset yang dilaksanakan melalui: (i) Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas reforma agraria di Kab/Kota; (ii) Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan; (iii) Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertifikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin; (iv) Publikasi tata batas kawasan hutan; (v) Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi; (vi) Legalisasi untuk tanah transmigrasi; dan (vii) Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Kegiatan Prioritas



Gambar 3.107  
Kegiatan  
Prioritas  
Kepastian  
Hukum dan  
Legalisasi atas  
Tanah Obyek  
Reforma Agraria

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria	
	1. Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas reforma agraria di Kab/Kota	2.600 orang
	2. Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan	126.000 dan 522.656 ha
	3. Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin	879.250 bidang
	4. Publikasi tata batas kawasan hutan	900 km
	5. Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi	69.420 bidang
	6. Legalisasi tanah transmigrasi	10.500 bidang
	7. Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat	17 Provinsi

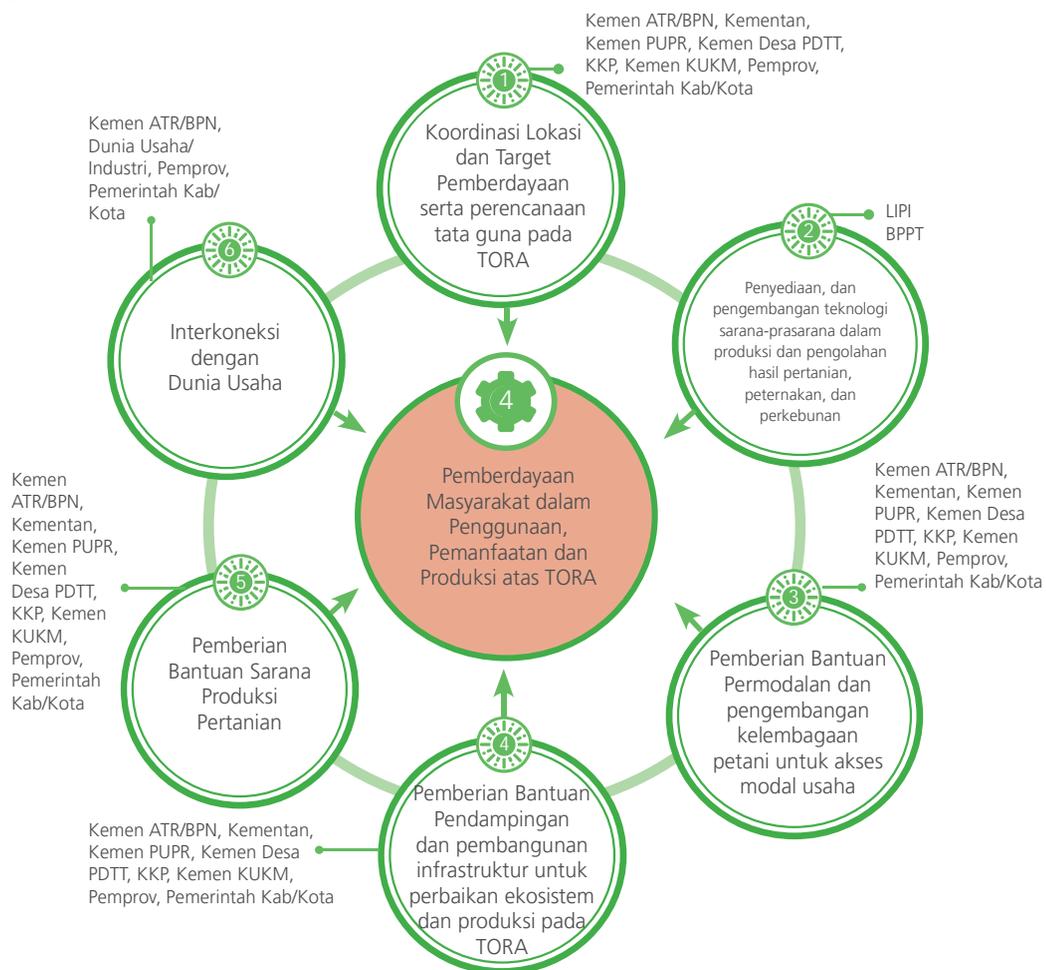
Tabel 3.75  
Kegiatan  
Prioritas  
Kepastian  
Hukum dan  
Legalisasi atas  
Tanah Obyek  
Reforma Agraria

#### 11.3.4. Program Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria, dilakukan dalam rangka memberikan reforma akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima reforma aset dalam kerangka reforma agraria yang dilaksanakan melalui: (i) Koordinasi Lokasi dan Target Pemberdayaan; (ii) Pengembangan Teknologi Pertanian dan Pengolahan; (iii) Pemberian Bantuan Permodalan; (iv) Pemberian Bantuan Pendampingan; (v) Pemberian Bantuan Sarana Produksi Pertanian; dan (vi) Interkoneksi dengan Dunia Usaha.

#### Kegiatan Prioritas

Gambar 3.108  
Kegiatan  
Prioritas  
Pemberdayaan  
Masyarakat  
dalam  
Penggunaan,  
Pemanfaatan  
dan Produksi  
atas TORA



Kegiatan  
Pemberdayaan  
Masyarakat  
dalam  
Penggunaan,  
Pemanfaatan  
dan Produksi  
atas TORA

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA	
	1. Koordinasi Lokasi dan Target Pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA	270 kantor pertanahan
	2. Penyediaan, dan pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan	5 kegiatan
	3. Pemberian Bantuan Permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha	76 kantor pertanahan



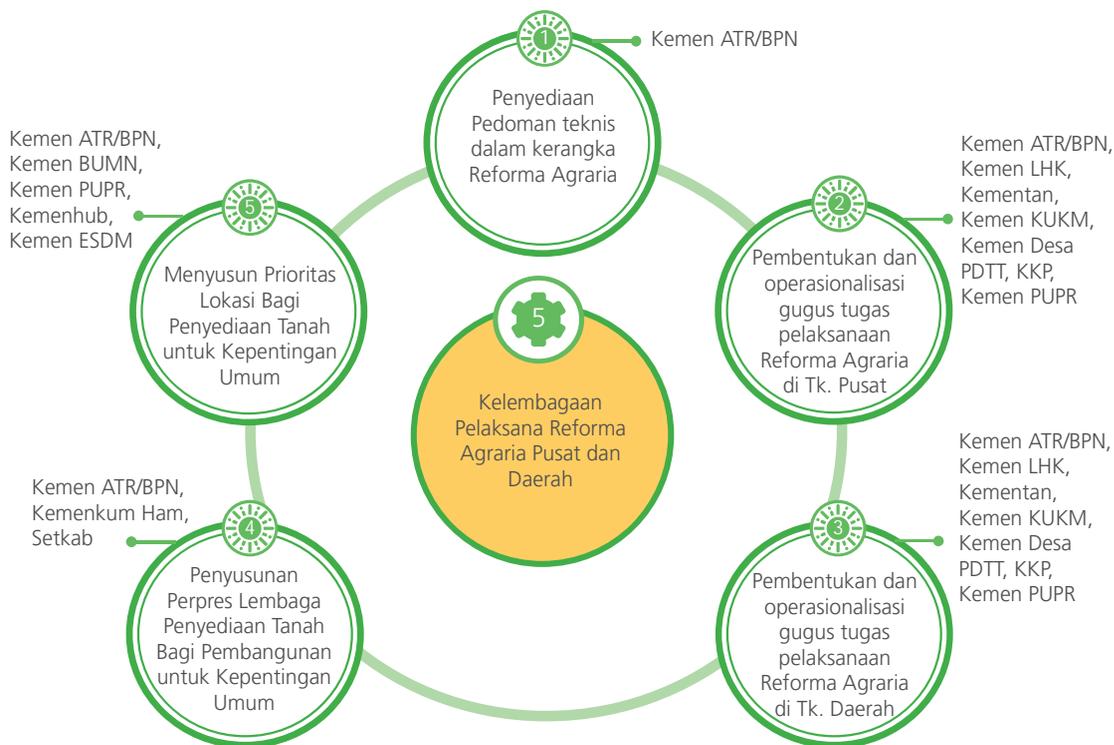
**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
4.	Pemberian Bantuan Pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA	311 pembinaan
5.	Sekolah lapang petani subyek penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan tata guna tanah produksi	5 kegiatan
6.	Interkoneksi	5 kegiatan

### 11.3.5. Program Prioritas Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

Program Prioritas Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah bertujuan untuk menyiapkan kelembagaan pelaksanaan reforma agraria baik di tingkat pusat maupun daerah melalui: (i) penyediaan pedoman teknis dalam kerangka reforma agraria; (ii) pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan reforma agraria di tingkat pusat; (iii) pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan reforma agraria di tingkat daerah; (iv) penyusunan peraturan presiden lembaga penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (v) penyusunan prioritas lokasi bagi penyediaan tanah untuk kepentingan umum.

#### Kegiatan Prioritas



Gambar 3.109  
Kegiatan  
Prioritas  
Kelembagaan  
Pelaksana  
Reforma  
Agraria Pusat  
dan Daerah

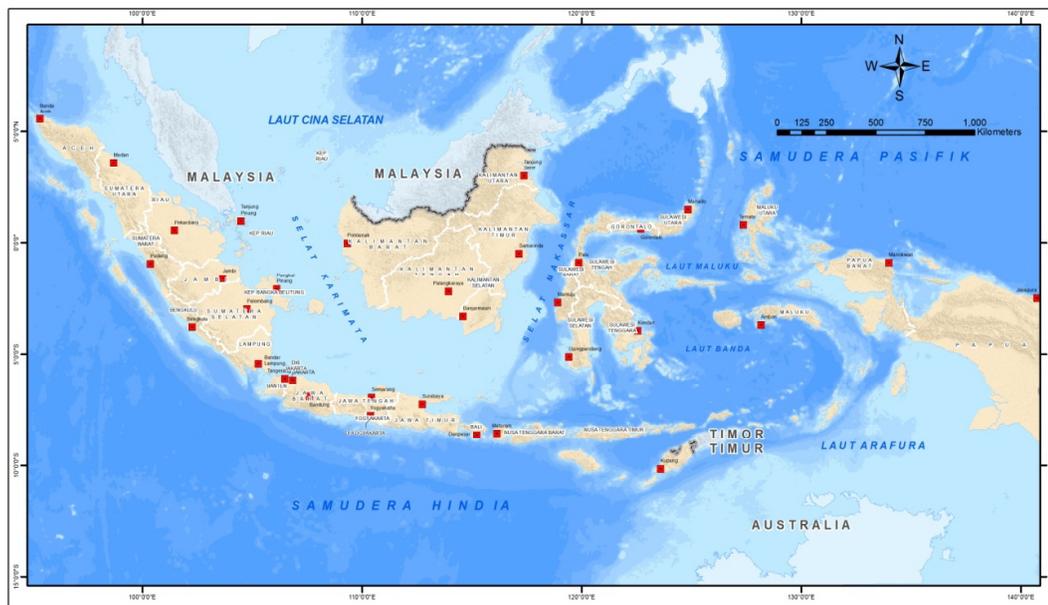
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
5.	Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah	
	1. Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka Reforma Agraria	1 juknis
	2. Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat	1 tim

Tabel 3.76  
Kegiatan  
Prioritas  
Kelembagaan  
Pelaksana  
Reforma  
Agraria Pusat  
dan Daerah

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
3.	Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Daerah	33 tim
4.	Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1 Perpres Lembaga Penyediaan Tanah
5.	Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 data

### Persebaran Wilayah

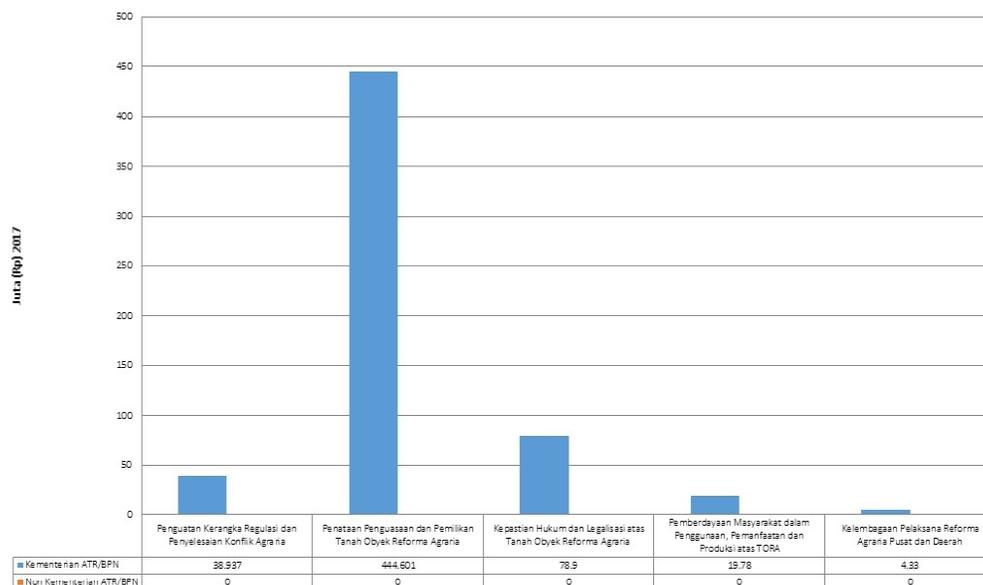
Gambar 3.110  
Persebaran  
Wilayah  
Reforma Agraria  
RKP 2017



Reforma Agraria RKP 2017  
■ 2017: Seluruh Wilayah Indonesia

Gambar 3.111  
Alokasi  
Anggaran  
Prioritas  
Nasional  
Reforma Agraria  
Tahun 2017  
Berdasarkan  
Sektor dan  
Program  
Prioritas

### Alokasi Pendanaan Program Prioritas



Catatan:  
Alokasi Anggaran Untuk Prioritas Nasional Reforma Agraria baru yang bersumber dari Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN